



Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat

Indriyani Kusumowardhani

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

indriyanikusumowardhani21@mhs.uinjkt.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.3787>

Abstract

Migration of Muslims to the west often faces a clash of civilizations. Therefore, the question from this research is how Muslim immigrants face the challenges of minority problems in Western countries, what policies have been made by Western countries as a solution to the clash of civilizations? The research uses qualitative methods through literature research which can provide a deeper understanding of the dynamics of migration and its problems. The findings from this research are that several Western countries have made policies that teach the principles of inclusivity, plurality and respect for all individuals and cultures. And the most obvious answer is "coexistence" despite having completely different beliefs, behaviors, habits and outward appearances.

Keywords: Migration, Problems, Muslim Minorities

Abstrak

Migrasi muslim ke barat seringkali menghadapi benturan peradaban atau *clash of civilization*, secara teoritis identitas budaya dan agama sebagai tradisi paling kuat menjadi titik kesenjangan utama dan sumber konflik dunia. Maka dari itu, Pertanyaannya dari penelitian ini bagaimana para imigran muslim menghadapi tantangan problematika minoritas di negara-negara Barat, dan kebijakan apa yang telah dibuat oleh negara-negara Barat sebagai solusi benturan peradaban?. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui penelitian pustaka yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika migrasi dan problematikanya. Temuan dari penelitian ini adalah beberapa negara Barat sudah membuat kebijakan yang mengajarkan prinsip inklusivitas, pluralitas serta menghormati semua individu dan budaya. Dan jawaban paling nyata adalah "hidup berdampingan" meski memiliki kepercayaan, perilaku, kebiasaan dan penampilan lahiriah yang sama sekali berbeda.

Kata Kunci: Migrasi, Problematika Minoritas Muslim

PENDAHULUAN

Migrasi seringkali dihubungkan dengan globalisasi, sebagai pergerakan massal yang kebanyakan adalah kaum miskin menuju negara-negara kaya dengan tujuan merubah nasib diri dan keluarganya.¹ Globalisasi merupakan pengutuban kekuatan ekonomi dan politik pada sekelompok negara tertentu yang diistilahkan dengan G7 atau G8.² Globalisasi telah menempatkan dunia ke dalam *multipolar* (multi adidaya), tidak ada

¹ Jonathon W Moses, *Migration Globalization's Last Frontier*, (Canda, Fernwood Publishing, 2006), hal.201

² William H. Mott IV, *Globalization People: Perspectives and Progress*. (London, Praeger, 2004), hal, 140

Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat – Indriyani Kusumowardhani

lagi dua adidaya (*bipolar*) atau satu adidaya (*unipolar*).³ Konstelasi politik dan ekonomi memang cepat berubah dengan drastis terutama sejak berakhirnya peristiwa perang dingin yang disusul dengan runtuhnya kekuatan Uni Soviet.

Samuel Huntington menggambarkan situasi persaingan antar kekuatan adidaya ini sebagai "benturan peradaban". Benturan peradaban atau *clash of civilization* adalah teori bahwa identitas budaya dan agama merupakan sumber konflik utama dunia dan menjadi titik diferensiasi persaingan.⁴ Peradaban dibentuk diantaranya oleh sejarah, bahasa, budaya, tradisi dan agama sebagai tradisi yang paling kuat. Setiap peradaban manusia memiliki pandangan yang berbeda tentang relasi antara Tuhan dengan manusia, individu dengan kelompok, warga negara dengan negara, orang tua dengan anak, suami dengan istri juga tentang hak dan kewajiban, kebebasan dan kewenangan, kesetaraan dan hierarki. Perbedaan ini produk selama berabad-abad yang mengakar secara fundamental melampaui ideologi dan rezim politik, dan sejarah telah mencatat konflik berkepanjangan atas nama perbedaan tersebut.⁵

Persoalan benturan peradaban ini yang juga mewarnai migrasi masyarakat muslim di negara-negara dimana mereka menjadi minoritas. Pada awalnya migrasi dilakukan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik atau karena kondisi politik negara yang tidak stabil, namun pada perkembangannya Migrasi bermetamorfosa ke dalam berbagai aspek secara simultan yang kemudian dikenal dengan istilah migrasi transnasional.⁶

Migrasi transnasional merupakan hasil dari pembauran antara masyarakat pendatang dengan penduduk asal yang saling melebur. Migrasi ini bisa terbentuk baik untuk mereka yang bersifat sementara atau yang permanen. Pada masyarakat yang bergerak melintasi batas negara, hubungan transnasional dapat dengan mudah terjadi, karena budaya menemukan bentuk mobilitas baru dalam *civilization of clashes* dan *struggles* yang saling mempengaruhi dan menciptakan budaya diaspora.⁷

Migrasi dan diaspora adalah keterhubungan, meski beberapa ahli menyatakan tak ada keterhubungan, namun selarawan mencatat banyak sekali imigran yang tidak bisa berbaur secara heterogen, sehingga muncul ketegangan antara mendiaspora atau menjadi etnis.⁸ Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan diaspora, pertama adalah paradigma tradisional yang melihat diaspora seperti yang dihasilkan dari beberapa

³ William H., *Globalization...* hal. 142

⁴ Tan Ta Sen, *Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara*, (Jakarta, Kompas Media Nusantara 2010, hal, 1)

⁵ Tan Ta Sen, *Cheng Ho, ...*, hal.2

⁶ Anastasia Bermudez, *Migration, Diasporas and citizenship, International Migration, Transnational Politics and Conflict, The Gendered Experiences of Colombian Migrants in Europe*, (London, Macmillan Publisher, 2016), hal, 165

⁷ Bermudez, *Migration, Diasporas...*, hal. 167

⁸ Bermudez, *Migration, Diasporas...*, hal. 169

bentuk pemaksaan yang menyebabkan pencabutan dan pemindahan dari tanah air mereka dan kedua pembacaan diaspora post-modern yang dikembangkan antropolog dan kritikus budaya yang menganggap diaspora sebagai ekspresi mode kesadaran dan identitas hibrida.⁹ Maka dari itu, penting kirannya penelitian ini mengetahui migran muslim menghadapi tantangan problematika minoritas di negara-negara Barat, dan kebijakan apa yang telah dibuat oleh negara-negara Barat sebagai solusi benturan peradaban?.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif analisis berupa kajian pustaka dengan sumber data primer dan sukuneder memanfaatkan pengamatan di media massa gejala muslim sebagai etnis minoritas di negara-negara barat yang di anggap superioritas. Selain itu, sumber data diperoleh dari buku-artikel dan prosiding yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan cara menganalisis data. Pertama, reduksi data, yang mana dalam langkah awal menyederhanakan serta mentransformasikan data yang diperoleh. Kedua, Penyajian data, penulis menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif bukan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diaspora Muslim

Selama beberapa dekade terakhir, konsep diaspora dan migrasi transnasionalisme memang mengalami perubahan makna. Kedua istilah ini sama-sama mengacu pada proses lintas perbatasan, diaspora digunakan untuk menunjukkan kelompok agama atau nasional yang tinggal di luar tanah airnya sedangkan transnasionalisme adalah ikatan para migran di seluruh negara yang tidak hanya komunitas, tetapi juga dalam berbagai bentuk formasi sosial, seperti jaringan, kelompok dan organisasi.¹⁰

Konsep diaspora sendiri pada awalnya adalah konsep yang mendeskripsikan pengalaman historis kelompok tertentu yang tercerabut dari tanah kelahirannya seperti Yahudi dan Armenia dan belakangan terjadi pada orang-orang Palestina. Konsep ini lalu mengalami perluasan makna menjadi hubungan antara warga negara perbatasan atau warga negara yang bermigrasi dengan tujuan untuk dapat kembali ke tanah airnya. Tanah air ini sendiri juga bisa berupa daerah non teritorial seperti umat Islam Global. Hal ini menunjukkan bahwa diaspora tidak semata-mata bersifat etnis tapi juga agama. Perubahan makna ini menunjukkan bahwa gagasan diaspora tidak sepenuhnya mengintegrasikan anggotanya secara sosial-politis, ekonomi dan budaya ke negara

⁹ Mary 1. Hickman and DAJ Maccherson, ed. *Women and irish Diaspora Identities, Theories, Concepts and New Perspectives*, (UK, Manchester University Press, 2014), hal. 11

¹⁰ Rainer Bauböock and Thomas Faits, *Diaspora and Transnationalism, Concepts, Theories and Methods*, (Amsterdam University Press, 2010), hal. 10

Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat – Indriyani Kusumowardhani

dimana mereka tinggal, bahkan mungkin saja memelihara batasan-batasan dari kelompok mayoritas. Itu sebabnya diaspora sering dikaitkan pula dengan pemeliharaan mayoritas sebagai kelompok dominan yang mendiskriminasi kelompok diaspora.¹¹

Identitas diaspora dianggap sebagai cara untuk melawan negara-bangsa yang dipahami sebagai homogenisasi budaya, hegemonik dan diskriminatif. Untuk kelompok diaspora, kepentingan ditempatkan pada pengenalan hibriditas, banyak identitas dan afiliasi dengan sesama, sebab dan tradisi di luar negara tuan rumah. Tololyan (1996) menyatakan bahwa diaspora melibatkan berbagai variabel transformasi sosial termasuk agama. Komunitas diaspora berbagi satu kesamaan; bagaimana bertahan sebagai sebuah kelompok.¹² Steven Vertovec berpendapat bahwa diaspora adalah "*imagined connection*" antara populasi pasca migrasi dan tempat asal dan dengan orang-orang yang memiliki asal usul budaya yang serupa di tempat lain. Dengan membayangkan, mereka membangun sentimen kuat dan gambaran jiwa yang menuntun terbentuknya anggota diaspora dan melakukan praktik budaya mereka.¹³

Diaspora muncul dari beberapa bentuk migrasi, namun tidak semua migrasi melibatkan kesadaran diasporik. Semua komunitas transnasional terdiri dari diaspora, namun tidak semua diaspora mengembangkan transnasionalisme. Sebuah studi yang dilakukan Kim Knott dan Sadia Khokhler pada wanita muda muslim dari Asia Selatan yang menetap di Inggris menggambarkan 'peta perseptual' yang memungkinkan adanya pernyataan situasional, penolakan atau sintesis nilai atas persepsi 'religius' atau 'etnis'. Dikatakan bahwa banyak wanita muslim membedakan antara agama dan budaya, dimana tradisi etnis seperti jilbab adalah tradisi etnis dan bukan gambaran religiusitas, Kesadaran ini menggambarkan bahwa meski bermigrasi kesadaran diasporik yang terhubung dengan tanah air dan budaya mereka tidak secara otomatis terhubung.¹⁴

Kastorvano sebagaimana dikutip Driss Habti membedakan dua jenis diaspora muslim, yang pertama dibentuk oleh orang-orang yang mengimajinasikan muslim ke dalam "Ummah", komunitas muslim bersama dengan merujuk pada budaya territorial mereka dan kedua yang mengekspresikan kesetiaan kepada berbagai negara atau negara bagian. Persoalannya dua tipe ini sulit diidentifikasi, dan karena mereka adalah kaum minoritas, keputusan kaum muslim diaspora itu mempengaruhi kebijakan negara atas mereka. Pertanyaan apakah muslim diaspora benar-benar menjadi bagian dari warga

¹¹ Bauböock. *Diaspora and...*, hal. 13.

¹² Bauböock, *Diaspora and...* hal. 16

¹³ Driss Habti, *The Religious Aspects of Diasporic Experience of Muslims in Europe within the Crisis of Multiculturalism, Policy Futures in Education*, Volume 12 Number 1 2014, www.wwwords.co.uk/PFIE, hal. 150

¹⁴ Habti, *The Religious...*, hal. 153

negara Eropa misalnya, menjadi pertanyaan penting. Karena keberadaan umat Islam juga instrumen dari tindakan politik suatu negara.¹⁵

B. Menjadi Minoritas

Penyebutan minoritas biasanya didefinisikan sebagai masyarakat kelompok sosial tertentu yang secara jumlah warganya jauh lebih kecil dibandingkan kelompok lain, sehingga mereka rentan didiskriminasi. Secara sosiologis, minoritas mengindikasikan tiga hal. Pertama, anggotanya sangat tidak diuntungkan akibat diskriminasi, kedua, anggota kelompoknya memiliki solidaritas dengan "rasa kepemilikan bersama" dan kelompok ini memandang dirinya "berbeda" dari kelompok mayoritas dan ketiga, mereka biasanya terisolasi dari komunitas yang lebih besar secara fisik dan sosial.¹⁶

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan minoritas sebagai berikut¹⁷:

"kelompok manusia yang secara kuantitas lebih kecil dibandingkan dengan populasi yang ada dalam suatu negara dan dalam kedudukan tidak dominan, yang anggotanya atau kewarganegaraannya berasal dari berbagai bangsa, etnis dan disertai dengan ciri keagamaan dan bahasa yang membedakannya dari sebagian besar populasi dalam negara itu, dan kelompok (minoritas) itu menunjukkan, sekalipun secara tersirat, suatu perasaan solidaritas yang ditujukan demi terpeliharanya kebudayaan, tradisi-tradisi, agama dan juga bahasa".

Kedatangan muslim ke beberapa negara di Eropa menurut Johan Galtung dimulai sekitar tahun 1960-an, tujuan awal kedatangan mereka adalah untuk mendapatkan pekerjaan, dan Eropa pada saat yang sama membutuhkan buruh yang bisa dibayar dengan murah, sehingga terbentuk simbiosis mutualisme antara keduanya. Seiring dengan perkembangan ekonomi di beberapa negara Eropa, muslim imigran pun mengalami peningkatan kelas ekonomi, bahkan pada generasi kedua dan ketiga, muslim imigran bisa bersekolah yang sama dengan penduduk asli.¹⁸ Meskipun eksistensi muslim di negara Eropa telah ada sejak lama, namun pengakuan politik atas eksistensi muslim masih belum sepenuh hati.

Prinsip *melting pot* yang khususnya menghasilkan hegemoni *Anglo-Saxon* telah dianut pemerintah Eropa dan Amerika sebagai etnisitas asli dalam pembentukan negara Amerika Serikat dimana didalamnya memonopoli ikatan primordial. Meski dalam tataran masyarakat muncul wacana pluralisme kultural atau *salad bowl* yang memberikan

¹⁵ Habti, *The Religious...*, hal. 154

¹⁶ Eddie Riyadi Terre "*Posisi Minoritas dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan*" dalam http://interseksi.org/pub.13.ions/essays/articles/posisi_minoritas.html (15 Desember 2017)

¹⁷ Hans Ucko, *Akar Bersama, Belajar tentang Iman Kristen dan Dialog Kristen-Yahudi*, (Jakarta, Gunung Mulia, 2001), hal. 37

¹⁸ LIPI, Pusat Penelitian Politik *Yearbook 2004*, (Jakarta, LIPI, 2004), hal. 74

Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat – Indriyani Kusumowardhani

keleluasaan bagi eksistensi dan etnisitas non *Anglo-Saxon* atau minoritas, namun pada kenyataannya kaum minoritas tersebut harus melebur ke dalam kultur hegemoni *Anglo-Saxon* dan mengorbankan etnisitas aslinya.¹⁹ Persoalannya adalah budaya yang berkembang antara kaum muslim dengan masyarakat Eropa-Amerika tidak sama, bahkan cenderung berseberangan. Hal ini yang secara tidak langsung menciptakan jarak antara muslim imigran dan Eropa sebagai sebuah budaya peradaban.

Situasi ini menjadi tidak menguntungkan bagi masyarakat muslim di Barat, apalagi sikap pemerintah dan masyarakat di Negara-negara tersebut terhadap masyarakat muslim seringkali dipengaruhi oleh perkembangan politik di Timur Tengah. Kondisinya menjadi semakin buruk pasca tragedi 9/11 (11 September). Dimana kelompok militan al-Qaeda dinyatakan bertanggung jawab atas serangan yang menabrakkan dua pesawat penumpang ke dua titik sasaran yaitu ke arah World Trade Center *Twin Tower* di New York City dan ke arah Pentagon di Arlington, Virginia

Peristiwa 9/11 telah memunculkan Islamophobia di berbagai wilayah. Media-media Barat kerap mengeksploitasi frasa "militan muslim" dan "teroris muslim" sehingga menyudutkan masyarakat muslim di Barat. Bahwa yang menjadi dasar terjadinya serangan tersebut, berkaitan dengan sikap kesewenangan Amerika terhadap beberapa Negara di Timur Tengah seperti Irak dan Iran ataupun politik Israel, hal tersebut tidak mengendurkan sikap Islamophobia.

Meski Eropa dan Amerika selama bertahun-tahun telah menjadi tujuan imigran, namun ketika bicara tentang imigran Arab, selalu ada distingsi. Kesulitan Islam melebur ke dalam budaya Eropa, selalu dinyatakan sebagai kelayakan muslim minoritas ini untuk di diskriminasi. Karena bagi Barat (Eropa-Amerika) yang sudah sekuler, hak asasi manusia individual dan rangkaian instrumen normatif diselesaikan dalam kebijakan-kebijakan negara. Imigran muslim sebagai minoritas diharapkan bisa membaaur ke dalamnya, menyatu sebagai warga negara. Persoalan ini yang tidak mudah, bagaimana perang pemisahan wilayah terjadi antara Kroasia dengan Bosnia-Herzegovina terjadi, adalah gambaran bagaimana agama menjadi alat diferensiasi kewarganegaraan.²⁰

Lahirnya gagasan diaspora yang didorong situasi kondisi masyarakat muslim sebagai minoritas itu bertumpu pada tiga koordinat; tanah air, pemindahan (*displacement*) dan pemukiman (*settlement*). Dengan kata lain, diaspora terbentuk saat masyarakat pemukim mengartikulasikan dirinya dalam hal bermigrasi dari tanah airnya. Tanah air bertindak sebagai cakrawala dimana masyarakat mengartikulasikan rasa kolektifnya dari diri sendiri, dan ini tidak hanya terjadi pada muslim. Diaspora Yahudi adalah salah satu bukti, bagaimana mereka mengimajinasikan rumah kolektivitas

¹⁹ Johan Galtung, et al, *The Muslim Diaspora in Europe and the USA*. September 2012, www.transcend.org, www.cordoue.ch, hal 4

²⁰ Galtung, et.al, *The Muslim..*, hal. 5-6

mereka. Diaspora berfokus pada solidaritas menjadi minoritas dan upaya bersama untuk menemukan esensi diri mereka bersama sekelompok orang yang memiliki budaya yang sama.²¹

Melalui diaspora, usaha-usaha kelompok minoritas dalam mengekspresikan hak-hak mereka jauh lebih berani dari sebelumnya dan respon kaum mayoritas pun menjadi jauh lebih kuat. Islamophobia adalah bukti nyata dari respon dan reaksi antara minoritas muslim, dan mayoritas masyarakat barat di Eropa dan Amerika. Tariq Ramadan dalam bukunya *Western Muslims and the Future of Islam*, menyatakan meski Islamophobia yang ditandai dengan pemberitaan negatif oleh media massa, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tengah terjadi revolusi damai (*silent revolution*). Revolusi damai ini ditunjukkan dari upaya masyarakat muslim untuk menemukan jalan ideal untuk tetap beragama dan terlibat aktif di negara dimana mereka tinggal. Mereka membentuk apa yang diistilahkan Tariq Ramadan dengan Islam Amerika dan "Islam Eropa" ²²

Ada istilah yang dikembangkan dalam konteks peleburan imigran muslim ke dalam komunitas Eropa, apa yang disebut dengan "dari isolasi menjadi integrasi" Kesadaran ini tidak mudah, bahkan S. Sayid dalam tulisannya *The Homelessness of Muslimness: The Muslim Ummah as a Diaspora* menyatakan bahwa muslim di negara-negara Barat memang terbagi menjadi dua kategori, mereka yang tetap mengisolasi dengan mengimajinasikan "ummah" sebagai teritorial bersama muslim dan mereka yang mengintegrasikan dan membangun religiusitas di tengah masyarakat sekuler Barat.²³

C. Multikulturalisme

Secara pengertian, Multikulturalisme merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang memberi pandangan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat variasi budaya, dimana diantara entitas budaya ini bukan saling bersaing untuk memenangkan suatu pertarungan, namun hal ini terjadi karena adanya kesetaraan budaya.²⁴ Istilah multikulturalisme diperkenalkan ke dalam birokrasi politik dan identik dengan keragaman dan toleransi. Di Australia, Kirsty Knight menyebutkan bahwa multikulturalisme diarusutamakan sebagai respon dari integrasi imigran ke dalam budaya dan kebiasaan masyarakat Australia.²⁵

²¹ Ali Riaz, *Islam and identity Politics among British-Bangladeshis, a Leap of Faith*, (UK, Manchester University Press, 2012), hal. 21

²² Tariq Ramadan, *Western Muslims and the Future of islam, ab. Teologi Dialog islam-Barat; Pergumulan Muslim dan Eropa*, (Bandung. Mizan, 2002), hal. 270

²³ S. Sayyid, *The Homelessness of Muslimness: The Muslim Umma as a Diaspora*. Human Architecture: Journal of The Sociology of Self-Knowledge, a Publication of OKCIR: The Omar Khayyam Center for Integrative Research in Utopia, Mysticism and Science (Utopys), ISSN: 1540-5699, Ahead Publishing House (imprint: Okcir Press) and authors., hal. 132-133

²⁴ Nursyam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia Dan Radikalisme Menuju Kebangsaan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009), hal. 79

²⁵ Kirsty Knight, *What I Multiculturalism?*, (Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication 1, 2 (20081, hal. 106

Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat – Indriyani Kusumowardhani

Tahun 2007, Pemerintah Howard di Australia merubah nama Departemen Urusan Imigrasi dan Multikultural menjadi Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan. Howard membela perubahan tersebut dengan mengatakan bahwa imigrasi harus mengarah pada kewarganegaraan. Langkah yang lebih nyata adalah pembuatan uji kewarganegaraan yang memaksa pendatang baru untuk mengadopsi kewarganegaraan Australia sekaligus meresepkan satu set nilai Australia untuk para imigran.²⁶ Gagasan multikulturalisme ini hadir sebagai usaha menciptakan identitas sosial/kolektif dimana Negara menjadi sentral dari pembentukan identitas sosial tersebut.

Gagasan ini merupakan *counter concept* dari konsep "fluiditas, migrasi dan diaspora". Diaspora dalam perspektif negara yang didiami oleh minoritas tentu mengganggu asumsi budaya dari sudut pandang yang lain, terutama jika hibriditas tidak bisa dilakukan.²⁷ Dalam sistem politik yang mapan pada negara-negara liberal, dibangun prinsip koherensi antara budaya dan bangsa sebagai kelompok yang didefinisikan secara teritorial. Nasionalisme penting sekali untuk dibangun dan tidak atas dasar perbedaan budaya antara kita dan mereka. Logika diaspora memang tidak bisa lepas dari perbedaan yang paling mendasar; yaitu perbedaan antara Barat dan Non-Barat. Perbedaan ini yang mendasari segala bentuk kolonialitas.

Multikulturalisme adalah upaya untuk mengatasi perbedaan Barat/Non-Barat dengan mengakui adanya banyak budaya dan kemustahilan budaya menjadi homogen.²⁸ Driss Habti menyatakan bahwa multikulturalisme adalah cara yang paling baik untuk mendamaikan praduga penduduk asli terhadap imigran muslim. Harus diakui di Uni Eropa telah muncul ketakutan bahwa khususnya vis-a-vis dengan imigrasi muslim yang membahayakan hidup keduanya. Dari rasa bahaya ini, lahir pula langkah-langkah legal, baik administratif maupun politik yang restriktif dan meningkat pula popularitas partai politik ekstremis. Kecenderungan "anti sipil" muslim berkembang, padahal pada saat yang sama banyak catatan bagaimana imigran muslim mulai berbaur pada lembaga pendidikan umum di Barat dan hal ini mengindikasikan kemajemukan di Barat.²⁹

Bagaimanapun juga gagasan tentang "*imagine community*" atau "ummah" bukan teritorial yang bisa kita dapatkan dalam peta. Gagasan ini adalah mitologi yang hidup yang menawarkan keanggotaan transnasional yang mengabaikan etnisitas dan geografi. Hal yang paling penting dari gagasan ini adalah diaspora sebagai minoritas yang tersebar, tidak terkandung dan tidak terkendali secara historis dan nasionalis baik dengan negara asalnya atau dengan negara tujuannya. Fenomena ini harus didekati dengan dua struktur, pertama dengan pendekatan historis dan kedua dengan penafsiran ulang. Kedua pendekatan ini berkaitan erat dengan tradisi dan budaya, dan itu sebabnya tidak

²⁶ Kirsty Knight, *What is....*, hal 107

²⁷ Kirsty Knight, *What is....*, hal 108

²⁸ S.Sayyid, *The Homelessness..*, hal. 141

²⁹ Driss Habti., hal. 158

mungkin melakukan peleburan (asimilasi) budaya minoritas ke mayoritas, yang bisa dilakukan hanya menciptakan kesadaran multikulturalisme.³⁰

Multikulturalisme dalam pengertian yang lebih aplikatif memberikan penekanan pada pentingnya mempelajari tentang kebudayaan lain, dengan mencoba memahami mereka secara menyeluruh dan empatik. Dengan kata lain multikulturalisme adalah implikasi sikap yang harus memberikan penilaian secara positif untuk mengapresiasi kebudayaan-kebudayaan lain. Multikulturalisme muncul dalam kemajemukan yang saling mengadaptasi (*mutual adaptation*), sehingga semua kelompok saling memperoleh gagasan-gagasan yang inovatif dari pertukaran - baik yang sifatnya berupa kultural maupun manufaktural dan material dari berbagai penjuru dunia. Praktik multikulturalisme yang paling "nyata adalah "hidup berdampingan" (*cheek by jowl*) yang menyebabkan sebagian orang hidup bertetangga meski memiliki kepercayaan, perilaku, kebiasaan dan penampilan lahiriah yang sama sekali berbeda.³¹

Isu multikulturalisme sebenarnya bukan hal baru, sejak akhir 70-80-an, isu ini sudah pernah mengemuka. Gerakan imigran dan minoritas Meksiko-Amerika, Puerto Riko dan Asia Amerika untuk memperoleh kemajuan secara legislasi bagi teori dan praktik pendidikan dua bahasa (*bilingual education*) merupakan fakta yang tak bisa diabaikan. Pendidikan multikultural menyebut ketidakadilan dengan istilah penindasan yang terlembagakan (*institutionalized oppression*). Pendidikan ini menyerukan rekonfigurasi keluarga yang mengajarkan keberagaman (*teaching diversity*). Pendidikan multikultural membutuhkan penyesuaian rasional secara intelektual, etis, pragmatis dan sosial yang saling terkait: yaitu mengajarkan prinsip inklusivitas, pluralitas serta menghormati semua individu dan budaya, sebagai persyaratan penting untuk kehidupan etis dan partisipasi warga negara yang sepenuhnya berada dalam demokrasi multikultural dan masyarakat global yang beragam.³²

D. Politik identitas dan Ekstrimisme

Banyak kalangan yang memandang multikulturalisme sebagai utopia. Multikulturalisme lebih mudah didefinisikan ke dalam teori-teori tetapi selalu sulit diimplementasikan terutama dalam kebijakan negara. Hampir tidak ada satu peradaban yang tidak memiliki tingkat "ego" yang tinggi. Meski semua peradaban menganjurkan toleransi di saat yang sama juga menekankan pentingnya menguasai peradaban lain, sehingga toleransi hanya terjadi sepanjang penguasa menentukan batas-batasnya. Bahkan di negara-negara liberal sekalipun, multikulturalisme tetap menyisakan sarat-syarat yang tidak sedikit.

³⁰ Driss Habti., hal. 159

³¹ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta, Erlangga, hal. 5

³² Baidhawiy, *Pendidikan Agama..*, hal. 11-12

Augie Fleras yang dikutip oleh Ibnu Nadzir³³ mengajukan setidaknya tiga macam tafsir multikulturalisme yang menjadi model kebijakan beberapa pemerintahan:

Multikulturalisme Konservatif	Multikulturalisme Liberal	Multikulturalisme Plural
<ul style="list-style-type: none"> - Meyakini bahwa keberadaan masyarakat yang memperlihatkan ekspresi budaya adalah dimungkinkan, selama mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada dan setiap individu diberikan pengakuan dan penghargaan yang sama. - Keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika semua individu diperlakukan dengan setara tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Hal ini didasarkan pada setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meyakini bahwa keberadaan masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dimungkinkan selama perbedaan budaya diterima, namun pada umumnya diabaikan. - Dalam peraturan sehari-hari perbedaan budaya seringkali diabaikan, namun dalam beberapa kasus tertentu diakui terdapat pengecualian terhadap perbedaan budaya ini. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meyakini bahwa keberadaan masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dimungkinkan selama perbedaan-perbedaan tersebut diperhatikan dengan serius dalam pembuatan kebijakan. - Dalam model kebijakan ini, masing-masing kelompok memiliki hak untuk diperlakukan secara berbeda. Setiap kelompok dapat mengembangkan identitas dan institusi kelompoknya sesuai dengan kebutuhan latar belakang budaya mereka.

³³ Ibnu Nadzir, *Kasus Multikulturalisme Belanda sebagai Kritik atas Utopia Multikulturalisme Indonesia*, (Ejournal.lipi.go.id, Edisi XXXVII/No.2/2011). hal. 30

Tiga model kebijakan ini lahir atas respon terhadap minoritas di berbagai wilayah. Multikulturalisme konservatif misalnya digunakan oleh Amerika Serikat karena dominasi kapitalis dan sekularis yang mereka anut, sehingga diasumsikan bahwa ekspresi budaya dan perbedaannya disimpan sebagai hal yang bersifat pribadi. Dikarenakan perbedaan budaya yang secara terbuka di ruang publik dapat menjadi ancaman bagi kepentingan bersama.³⁴ Hal ini yang mungkin sulit diterima oleh sebagian komunitas muslim yang hendak mempertahankan simbol-simbol ke-islaman mereka seperti bercadar dan atau beribadah dalam keseharian.

Di Canada, kebijakan terkait multikulturalisme liberal lebih condong pada pengakuan terhadap hak keragaman pada tingkat individu daripada tataran kelompok. Hak-hak khusus kelompok hanya diakui dalam hal-hal yang mendasar seperti bidang kesehatan dan pendidikan.³⁵ Hal ini dilakukan Canada karena tingkat imigran dan pembelajar di wilayah ini sangat tinggi, sehingga Canada harus mengambil langkah-langkah pembedaan budaya yang paling minim. Dengan menempatkan kesetaraan pada pelayanan publik, diharapkan seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang dapat merasakan kehadiran negara dan karenanya negara pun meminta masyarakat untuk tidak menunjukkan identitas individual berada di ranah publik, terutama yang resisten terhadap kebudayaan lain.

Sebaliknya di Belanda, kebijakan multikulturalisme plural dilaksanakan dengan mendasarkan pada latar belakang sejarahnya dalam mencari nilai toleransi terkait dengan konflik yang melibatkan simbol-simbol agama. Toleransi dalam kebijakan ini ada dalam dualisme antara "tidak menerima" dan "tidak menghukum". Toleransi bersifat *surficial*, mereka menolak mengakui perbedaan tapi juga tidak melakukan penyerangan. Bentuk toleransi semacam ini yang secara perlahan memunculkan sikap netralitas-nilai.³⁶ Sikap ini di satu sisi menguntungkan tetapi di sisi lain menyimpan sekam yang sangat kuat.

Multikulturalisme mensyaratkan adanya kesadaran aktif setiap orang untuk mengakui adanya perbedaan, sementara perbedaan itu tidak dipahami oleh masing-masing orang yang berbeda. Bahwa masyarakat secara mutlak menyadari adanya perbedaan, tapi untuk sampai kepada kesadaran itu setiap orang harus memahami budaya/agama lain sehingga mereka bisa menghargainya. Jika kita merujuk kepada kebijakan multikulturalisme di atas, maka bisa kita dapatkan bahwa usaha memultikulturalistikan masyarakat belum terjadi. Sebaliknya dengan menempatkan perbedaan-perbedaan krusial ke dalam ranah individu, yang terjadi adalah diskriminasi kelompok dan pada akhirnya memperkuat politik identitas. Persepsi akan terjadinya pengelompokan berdasarkan budaya tertentu didorong oleh capaian atau adanya

³⁴ Ibnu Nadzir, *Kasus Multikulturalisme...* hal. 30

³⁵ Ibnu Nadzir, *Kasus Multikulturalisme...* hal. 30

³⁶ Ibnu Nadzir, *Kasus Multikulturalisme...* hal. 34

peristiwa penindasan di masa lampau (historis) dan adanya tuntutan untuk mendapat perlakuan yang tidak sama sebagai bentuk kompensasi. Selain itu, penggunaan identitas pun digunakan sebagai pembenaran,, meskipun kebenarannya belum dapat dipastikan.³⁷

Ira Lapidus menggambarkan bagaimana selalu ada ketegangan yang melekat antara universalitas Islam dan pengalaman tradisi tertentu yang berakar pada konteks budaya tertentu. Sebagian besar sejarah Islam telah melihat "osilasi" antara keduanya, dan ketegangan serupa selalu bisa ditemukan pada setiap agama di dunia, terutama antara ortodoks (ekstrim) dan moderat. Migrasi, diaspora dan transnasionalisme menjadi bagian yang bisa memoderasi dan atau membuatnya menjadi semakin ekstrim.³⁸ Karena jarak yang memisahkan mereka dengan tanah air asalnya dan budaya yang tidak sama dengan dirinya dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap loyalitas kenegaraan mereka.

Lebih lanjut, kemunculan gerakan ekstrimis Islam ditandai sekurang-kurangnya pada tiga hal, yaitu: hijrah kembali kepada Islam seperti yang dilakukan oleh ulama salaf yang saleh, implementasi syariah dan khilafah Islamiyah serta kecenderungannya untuk menolak produk Barat. Adanya gerakan yang diistilahkan dengan teo-demokrasi juga memiliki tempat pada generasi muda, karena adanya tawar-tawaran *problem solving* atas berbagai kesulitan hidup yang semakin kompleks, di mana negara (baik dimana mereka tinggal atau asal mereka) tidak mampu memberikan solusi yang cerdas sehingga diperlukan konsep yang rujukannya dianggap kuat, meski belum teruji dan tidak ditemui prototipenya di belahan dunia.³⁹

Gerakan teo-demokrasi ini bukan hal baru dalam sejarah Islam, mengakar pada gerakan Hasan al-Banna, al-Maududi yang berkembang di Mesir kemudian ke India dan Pakistan dan menemukan komunalnya dalam Ikhwanul Muslimin dan usahanya memberontak (makar) terhadap pemerintah di Mesir. Gerakan ini seringkali dianggap sampai dengan Hizbut Tahrir yang juga berkembang di Indonesia menjadi gerakan keagamaan dan politik yang cenderung melawan pemerintah.⁴⁰ Jika di negara-negara Islam saja, gerakan semacam ini dipandang tidak berkesesuaian dengan nasionalisme kewarganegaraan yang dikembangkan, maka tentu saja menjadi hal yang lumrah apabila di Negara-negara Barat gerakan ini pun dipandang sebagai sebuah ancaman bagi tatanan kehidupan berbangsa-bernegara.

³⁷ Ibnu Nadzir, *Kasus Multikulturalisme...* hal. 43

³⁸ Ira M Lapidus, *Between Universalism and Particularism, the Historical Bases of Muslim Communal, National and Global Identities*, Global Networks, 1/1). <http://d.doi.org/10.1111/1471-0374.00004>

³⁹ Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme...*, hal. 81

⁴⁰ Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme...*, hal. 81

Wendy Brown menyebutkan bahwa politik identitas lahir dari rasa sakit yang dirasa secara bersama-sama, seperti penjelasannya berikut:⁴¹

“Identitas yang dipolitisasi dengan demikian hanya mengisyaratkan dirinya sendiri, membuat klaim untuk dirinya sendiri hanya dengan menarik, mengulang, mendramatisir dan menuliskan kekecewaannya dalam politik, dan tidak dapat bertahan dalam masa depan - untuk dirinya sendiri atau orang lain - yang bisa menaklukan kekecewaan itu. Melalui sejarah dan harapan di masa depan, identitas tersebut direkonstruksi dalam struktur keinginan ekspresi politik dengan merubah konsep dari ‘saya’ dengan identitas yang defensif “apa yang saya inginkan”.

Sehingga tidak mengherankan jika implementasi politik identitas tampil dengan sikap radikal dan ekstrim.

Kelompok radikal dan ekstrim ini yang meyakini bahwa agama juga berlaku dalam ranah politik. Mereka berusaha menolak konsep pemisahan antara ruang pribadi dan publik, yang selama ini dikembangkan melalui sekularisme Barat. Mereka juga berusaha melepaskan diri dari epistemologi dan moralitas Barat yang menarik, tidak pada perkembangan ilmu dan teknologi. Mereka percaya bahwa perkembangan ilmu dan kebangkitan Islam hanya bisa berlangsung jika muslim memanfaatkan sumber-sumber Islam untuk pengembangan intelektual dan spiritual dalam pengertian terbatas, tentang tauhid. Kelompok ini menghidupkan semangat *imagine community* dengan berdakwah dengan Khilafah sebagai sentra point kebangkitan Islam dan jihad sebagai cara melakukannya.

Menurut Tahir Abbas, konsensus dari gerakan ini tidak pernah ada. Meski mereka muslim, tetapi gerakan semacam ini tidak bisa menggeneralisir muslim dunia secara keseluruhan. Symbolisme separatis yang dikembangkan kelompok ini memiliki makna ganda yang saling berkaitan. Pertama menunjukkan keterpisahan ‘spasial’ komunitas muslim dan kedua politik Islamisme untuk memisahkan diri secara sosial dan budaya dari kondisi modernitas dan pascamodernitas dan relativisme moral, budaya, religius serta intelektual.⁴² Dengan demikian, jihad, teror dan pemikiran tentang Khilafah atau *imagine community*, bukan sebuah konsensus dan tak bisa dibenarkan sebagai penilaian umum terhadap umat Islam secara keseluruhan.

E. Islam Kultural: Sebuah Kesadaran

Mengapa Islam sebagai sebuah kesatuan yang melintasi batas wilayah Negara tidak bisa menjadi sebuah kesatuan dalam sistem politik? Bahwa Islam pernah menjadi penguasa dunia di masa Umayyah, Abbasiyah sampai dengan Turki Utsmaniyah, itu

⁴¹ David L. Eng and David Kazanjian, ed., *Loss The Politics of Mourning*. (London, University of California Press, 2003) hal. 453

⁴² Tahir Abbas, *Islamic Radicalism and Multicultural Politics The British Experience*, (London, Routledge, (2011) hal. 136

semua adalah fakta yang tak bisa diabaikan. Namun, apakah pada masa Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmaniyah tersebut, umat Islam benar-benar hidup dalam perlindungan satu sistem perpolitikan atau tidak, atau apakah pada masa itu, umat Islam terlindungi secara politik dan kewarganegaraan?.

Sejarah mencatat bagaimana peralihan dari setiap dinasti dan bagaimana setiap dinasti muslim berusaha menghapus dinasti sebelumnya, atau bagaimana setiap dinasti terdiri pula dari kerajaan-kerajaan kecil. Ini mengindikasikan bahwa kesatuan Islam dalam dinasti-dinasti tersebut merupakan hal yang absurd. Karena tak ada satu dinasti pun yang benar-benar menciptakan sistem kesatuan Islam yang absolut. Pada masa dinasti-dinasti itu pun disintegrasi Islam sendiri sudah terjadi.

Perpecahan ideologi kalam misalnya, antara Mu'tazilah, Syi'ah, Sunni, Khawarij dan aliran kalam lainnya, telah menempatkan Islam ke dalam perbedaan internal, dan seringkali Umat Islam sendiri tak mampu menyelesaikan persoalan perbedaan ini. Tidak jarang perbedaan ini menjadi landasan bagi perang saudara yang terjadi selama beberapa tahun dalam sejarah Islam. Bahkan hingga saat ini, kasus yang sama masih terus terjadi.

Jika dalam salah satu tulisannya, Nash Hämüd Abü Zayd menyajikan tesis bahwa kitab suci al-Quran merupakan produk kebudayaan (*muntäj al-thaqäfh*), yang hadir sebagai tanggapan atas problematika budaya, kemudian muncul seiring perkembangan Islam. Sebagai hasilnya, Islam pun menjadi agama yang responsif terhadap problematika budaya dan juga menjadi pencipta budaya. Nalar al-Qur'an ini menjadi landasan bagi keberlangsungan terciptanya kehidupan budaya manusia.⁴³

Ketika Islam berkembang di Arab, didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Islam menjawab konteks budaya dengan menciptakan budaya yang lebih beradab dan berperadaban. Jika Arab yang jahiliah dengan kedatangan Islam dapat menjadi kekuatan baru dalam perpolitikan dunia pada masa itu, maka tentu saja kedatangan Islam ke belahan dunia lainnya pun bisa berlaku yang sama, sepanjang Islam tidak dihadapkan secara vis a vis dengan budaya yang berkembang di dalamnya. Dalam perspektif ini, dapat dikatakan Islam sebagai Islam Kultural.

Pada tahun 1980-an, Gus Dur pernah mengembangkan istilah "pribumisasi Islam" yang konsepnya menggambarkan bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif ini berasal dari Allah kemudian disesuaikan dengan kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan cirinya masing-masing. Dalam konsep ini tidak diperlukan istilah pemurnian Islam atau menyeragamkan dengan praktik keagamaan seperti yang

⁴³ Nasr Hämüd Abd Zayd, *Naqd al-Khitab a al-Dini*, (Kairo, Maktabah Madbüli, 2003), hat 27

dilakukan oleh masyarakat muslim di Timur Tengah. Karena proses arabisasi itu pada hakikatnya akan mencerabut masyarakat dari akar budayanya sendiri.⁴⁴

Meninjau masuknya Islam di Indonesia misalnya, yang seringkali merujuk pada kisah wali songo, yang mengadopsi budaya lokal yang memiliki nilai-nilai serupa dengan Islam atau menyisipkan ajaran Islam ke dalam budaya lokal, sehingga menciptakan Islam yang ramah dan adaptif. Islam dapat diterima bangsa Indonesia saat itu tanpa kehilangan esensinya, sementara budaya lokal dapat terus berjalan. Kehadiran Islam di India, Pakistan, Cina, bahkan Persia, Yunani dan Romawi juga tak lepas dari usaha-usaha ulama Islam di zamannya untuk beradaptasi dengan budaya yang ada.

Bagaimana mu'tazilah tercipta karena asimilasi pemikiran Islam dan semangat rasionalis yang dikembangkan masyarakat Yunani dan Persia di zamannya. Atau bagaimana wahabi berkembang sebagai respon atas budaya mistis masyarakat Arab dan pengaruh Islam mewarnai pergerakan tersebut. Atau bagaimana Ahmadiyah berkembang di India karena pengaruh personifikasi dewa yang diilustrasikan pada Mirza Ghulam Ahmad. Sejarah telah mencatat bagaimana Islam dan budaya masyarakat saling berkaitan. Sehingga mengabaikan keberadaannya sama dengan mengabaikan bagaimana Islam berkembang dan menjadi agama besar kedua di dunia.

Islam kultural atau Islam revivalis sebagaimana yang diistilahkan Sayyed Nasr, adalah fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan pada tulisan (*scripture*), akan tetapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat (*communal politics*), pembentukan identitas (*identity formation*), persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang plural serta mengenai nasionalisme.⁴⁵ Sedangkan dorongan atas pemikiran *imagine community* (ummah) disebut dengan Islam puritan merujuk pada kelompok Wahabi di Arab Saudi. Kelompok ini menawarkan seperangkat referensi tekstual yang mendukung orientasi teologis yang intoleran dan mengucilkan kelompok yang berbeda.

Khaled Abou el Fadl menyebut kelompok puritanisme ini tidak seperti muslim apologetis, tidak lagi mengarahkan perhatian mereka untuk mengkooptasi atau menjadikan semua institusi Barat mereka klaim sebagai miliknya. Dengan berkedok mengklaim kembali Islam yang benar dan sejati, mereka mendefinisikan Islam sebagai antitesis terhadap Barat. Kalangan ini mengemukakan bahwa kolonialisme telah mencabut kebanggaan dan harga diri kaum muslim dan meyakinkan mereka akan inferioritas agama mereka sendiri. Situasi ini tanpa disadari telah menjebak umat Islam ke dalam kompetisi tak berujung dan sia-sia untuk dapat memuaskan Barat dengan membuktikan bahwa Islam juga cukup bernilai.⁴⁶

⁴⁴ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, (Jakarta, Desantara, 2001) hal. 37

⁴⁵ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta, Paramadina, 1999), hal. 8

⁴⁶ Khaled Abou el Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, (Jakarta, Serambi, 2006), hal. 120

Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat – Indriyani Kusumowardhani

Usaha-usaha puritanisme ini sama saja dengan berupaya menghegemonisasi Islam dengan berbagai latar budaya ke dalam satu budaya Islam saja. Ini artinya mengeliminir bagaimana Islam telah berkembang di berbagai wilayah di belahan dunia. Jika ini terjadi secara terus menerus, maka dugaan *clash of civilization* yang diramalkan Samuel Huntington bisa saja terjadi, bahwa Islam "wahabi" yang menghegemoni dengan Barat sebagai kekuatan kapitalisme dan beberapa peradaban lainnya. Teror serta perang sebagai efek dari kompetisi itu pun tak kan bisa dihindari lagi. Bagaimana al-Qaeda dan usaha mereka melawan Barat telah menimbulkan korban sebagaimana Islamophobia juga merugikan Islam itu sendiri.

Terorisme dan radikalisme menjadi isu bersama di seluruh negara dengan penduduk mayoritas muslim, karena puritanisme mengganggu keutuhan suatu bangsa, merusak nasionalisme dan kultur kebangsaan yang telah terbentuk selama berabad-abad. Kehadiran Islam di Indonesia misalnya tidak terlepas dari Islam Timur Tengah, tetapi juga tidak sama dengan Islam Arabisme. Dialektika antara agama Islam dengan budaya lokal yang lahir dari Kristen, Hindu dan Budha telah menghasilkan Islam Indonesia yang tidak sama dengan Islam di tempat lainnya. Ketika puritanisme hadir dan berkembang, Islam Indonesia yang telah menjadi penghubung bernegara dengan agama-agama lainnya di Indonesia menjadi terganggu. Pancasila sebagai ideologi negara digugat, dan sistem perpolitikan tidak diakui, dan harus diakui isu terorisme juga mewarnai situasi ini.

Atas dasar situasi sebagaimana tersebut di atas, maka kesadaran ber-Islam kultural sudah seharusnya menjadi sebuah kesadaran bersama. Islam harus ditempatkan kembali ke dalam posisinya sebagai agama yang berdialog dengan budaya dan mampu menjawab setiap tantangan zamannya. Islam bukan agama yang harus diletakkan secara vis a vis dengan agama atau peradaban lainnya. Meletakkan Islam ke dalam kompetisi hanya akan menginferioritas Islam itu sendiri, karena hakikatnya Islam menjawab tantangan zaman bukan melawan zaman itu sendiri.

Islam kultural sebagai respon dari Islam puritan ini mengandalkan tiga elemen penting. Pertama, Islam kultural bersifat kontekstual, yaitu memahami Islam sebagai ajaran yang melekat dengan zaman dan tempatnya. Adanya perubahan waktu dan perbedaan wilayah adalah pokok inti untuk memahami ajaran Islam. Kedua, sifat Islam kultural yang progresif, dimana perkembangan zaman tidak dianggap sebagai suatu ancaman terhadap ketidaksesuaian ajaran dasar agama Islam, melainkan sebagai dorongan untuk merespon secara kreatif dengan intensitas yang tinggi. Ketiga, sifat Islam kultural yang membebaskan, yaitu Islam menjadi ajaran yang mampu merespon secara universal terhadap masalah-masalah kemanusiaan tanpa memandang perbedaan agama

dan etnik. Dengan demikian, Islam tidak bersifat rigid dan kaku dalam menjawab realitas sosial yang senantiasa berubah.⁴⁷

Persoalannya adalah kontestasi Islam kultural dan Islam puritan in terus menerus mengemuka, pertanyaan-pertanyaan lanjutan tentang manakah Islam yang paling benar mewarnai pilihan untuk menjadi Islam kultural atau Islam puritan. Klaim-klaim yang dilontarkan kelompok Islam puritan yang secara terus menerus menyatakan Islam mereka sebagai islam asli dan murni perlu mendapatkan *counter discourse* dengan diskusi terbuka yang memperluas ruang adanya paradigma baru bagi setiap kelompok yang berdialog. Pada saat yang sama kelompok Islam kultural lebih banyak memilih untuk tidak melibatkan diri ke dalam debat-debat yang diajukan oleh Islam puritan, akibatnya gerakan Islam puritan ini dari hari ke hari semakin menggurita.

Hal ini cukup mengkhawatirkan, karena bisa saja pertarungan yang terjadi bukan lagi menjadi minoritas di negara-negara Barat, melainkan menjadi minoritas dalam beragama itu sendiri. Lalu Islam akan terjebak pada permasalahan yang sama yang menjungkirbalikkannya dari masa ber peradaban ke kemunduran: yaitu perang saudara.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa migrasi atau mobilisasi muslim ke negara barat dilatar belakangi oleh beberapa hal, muliai dari kepentingan pekerjaan, studi, dan pernikahan. Permasalahan para migran muslim di negara-negara barat terletak pada menyesuaikan budaya dan tradisi yang berbeda antara barat dan timur, serta pradigma barat terhadap muslim sebagai ancaman, melekat striotipe Islam eksklusif dan ekstrimis. Akan tetapi, bebrapa negara lambat laun barat melalui kebijakan-kebijakan bisa di bilang membuka satir, sehingga sedikit demi sedikit tertanam sikap inklusif dan membuka diri terhadap kuantitas migran muslim yang semakin meningkat, dan menyadari pluralitas, etnisitas, miltikultural serta menghormati semua individu dan budaya.

Daftar Pustaka

- Abbas, Tahir, *Islamic Radicalism and Multicultural Politics The British Experience*, (London, Routledge, 2011)
Abou, Khaled el Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, (Jakarta, Serambi, 2006)
Baidhaw, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta, Erlangga)
Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta, Paramadina, 1990)

⁴⁷ Naupal, *Islam Kultural dan Islam Fundamental di Indonesia*, (Prosiding ICSSIS, yang dipublikasikan secara online dalam <http://icssis.files.wordpress.com> diakses 3 Mei 2023, hal. 300

Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat – Indriyani Kusumowardhani

- Baubock, Rainer and Thomas Faits, *Diaspora and Transnationalism, Concepts, Theories and Methods*, (Amsterdam University Press, 2010)
- Bermudez, Anastasia, *Migration, Diasporas and Citizenship, International Migration, Transnational Politics and Conflict, The Gendered Experiences of Colombian Migrants Europe*, (London, Macmillan Publisher, 2016)
- Eng. David L. and David Kazanjian, ed., *Loss The Politics of Mourning*, (London, University of California Press 2003)
- Galtung, Johan, et al., *The Muslim Diaspora in Europe and the USA*, September 2012, diunduh dari www.transcend.org, www.cordoue.ch
- Habti, Driss, *The Religious Aspects of Diasporic Experience of Muslims in Europe within the Crisis of Multiculturalism, Policy Futures in Education*, Volume 12 Number 1 2014, www.worldwords.co.uk/PFIE
- Hämid, Nasr Abu Zayd, *Naqd al-Khitab a al-Dini*, (Kairo, Maktabah Madbūli, 2003)
- Hickman, Mary J. and DAJ Macpherson, ed., *Women and Irish Diaspora Identities, Theories, Concepts and New Perspectives*, (UK, Manchester University Press, 2014)
- Knight, Kirsty, *What is Multiculturalism?*, (Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication 1, 2 (2008)
- Lapidus, Ira M, *Between Universalism and Particularism; the Historical Bases of Muslim Communal, National and Global Identities, Global Networks*, 1(1), <http://dx.doi.org/10.1111/1471-0374.00004>
- LIPI, *Pusat Penelitian Politik*, Yearbook 2004, (Jakarta, LIPI, 2004)
- Moses, Jonathon W, *Migration Globalization's Last Frontier*, (Canda, Fernwood Publishing, 2006)
- Mott, William H. IV, *Globalization People, Perspectives and Progress*, (London, Praeger, 2004)
- Nadzir, Ibnu, *Kasus Multikulturalisme Belanda sebagai Kritik atas Utopia Multikulturalisme Indonesia*, (Ejournal.lipi.go.id, Edisi XXXVII/No.2/2011)
- Naupal, *Islam Kultural dan Islam Fundamental di Indonesia*, (Prosiding ICSSIS, yang dipublikasikan secara online dalam. <http://icssis.files.wordpress.com>), diakses 3 Mei 2023.
- Nursyam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009)
- Ramadan, *Tariq, Western Muslims and the Future of Islam*, ab. Teologi Dialog Islam-Barat; Pergumulan Muslim dan Eropa, (Bandung, Mizan, 2002)
- Riaz, Ali, *Islam and Identity Politics among British-Bangladeshis, a Leap of Faith*, (UK, Manchester University Press, 2013)
- Sayyid, S. *The Homelessness of Muslimness: The Muslim. Umma as a Diaspora*, Human Architecture: Journal of The Sociology of Self-Knowledge, a Publication of OKCIR: The Omar Khayyam Center for Integrative Research in Utopia, Mysticism and Science (Utopys), ISSN: 1540-5699, Ahead Publishing House (imprint: Okcir Press) and authors.

- Sen, Tan Ta, *Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara*, (Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010)
- Terre, Eddie Riyadi "Posisi Minoritas dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik, Pembebasan" dalam http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html (15 Desember 2017)
- Ucko, Hans, *Akar Bersama, Belajar tentang Iman Kristen dari Dialog Kristen-Yahudi*, (Jakarta, Gunung Mulia, 2001)
- Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, (Jakarta, Desantara, 2001)